



Laporan
Akuntabilitas
Kinerja

LAK
2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamuálaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua

Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (LAKIP BPK) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. LAKIP BPK tidak hanya mengikat BPK sebagai lembaga, namun juga mengikat unsur-unsur pelaksana BPK RI. LAKIP BPK merupakan cerminan dari pencapaian kinerja unit-unit kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, yang salah satunya adalah BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagai salah satu pelaksana BPK RI, BPK Perwakilan Provinsi NTB mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi NTB yang merupakan LAK Unit Kerja Eselon II. LAK Unit Kerja Eselon II berisi tentang tugas dan fungsi Perwakilan Provinsi NTB yang merupakan bagian unsur pelaksana Auditor Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) dan sebagai pertanggungjawaban kinerja unit eselon II dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK. LAK BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah dasar penyusunan LAK Pelaksana BPK (LAK Unit Organisasi Eselon I).

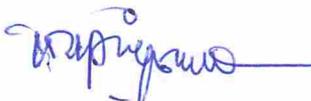
Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2016 ini akan mengurai tentang perencanaan strategis dan pernyataan komitmen pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB dan akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi NTB yang merupakan evaluasi atas pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Dalam pencapaian Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB, masih di bawah target yang tentunya ini akan menjadi perhatian dan evaluasi sehingga di masa yang akan datang dapat memenuhi seluruh target yang ada.

Demikian, semoga LAK BPK Perwakilan NTB Tahun 2016 ini dapat bermanfaat dan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK.

Wabillahittaufiq wal hidayah
Wassalamuálaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 8 Februari 2017
Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB


Wahyu Priyono
NIP 197006011991031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pemerintah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut antara lain mewajibkan setiap instansi pemerintah, tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 13 yang antara lain menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja adalah ayat (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan ayat (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka BPK sebagai lembaga beserta unsur-unsur pelaksana BPK RI mempunyai kewajiban untuk menyusun LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. Tugas dan Fungsi Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain mengatur bahwa BPK dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana BPK dan memiliki perwakilan di tiap provinsi. BPK Perwakilan Provinsi NTB merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan undang-undang tersebut, dimana Perwakilan Provinsi NTB adalah bagian unsur pelaksana Auditor Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) dan perwujudan keberadaan BPK di Provinsi NTB. AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan Departemen Pendidikan Nasional serta Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB diatur dalam Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi NTB mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi NTB, Kota/Kabupaten di Provinsi NTB, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Adapun Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten yang merupakan wilayah BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah sebagai berikut.

1. Provinsi NTB;
2. Kota Mataram;
3. Kabupaten Lombok Barat;
4. Kabupaten Lombok Tengah;
5. Kabupaten Lombok Timur;
6. Kabupaten Lombok Utara;
7. Kabupaten Sumbawa Barat;
8. Kabupaten Sumbawa;
9. Kabupaten Bima;
10. Kota Bima;
11. Kabupaten Dompu.

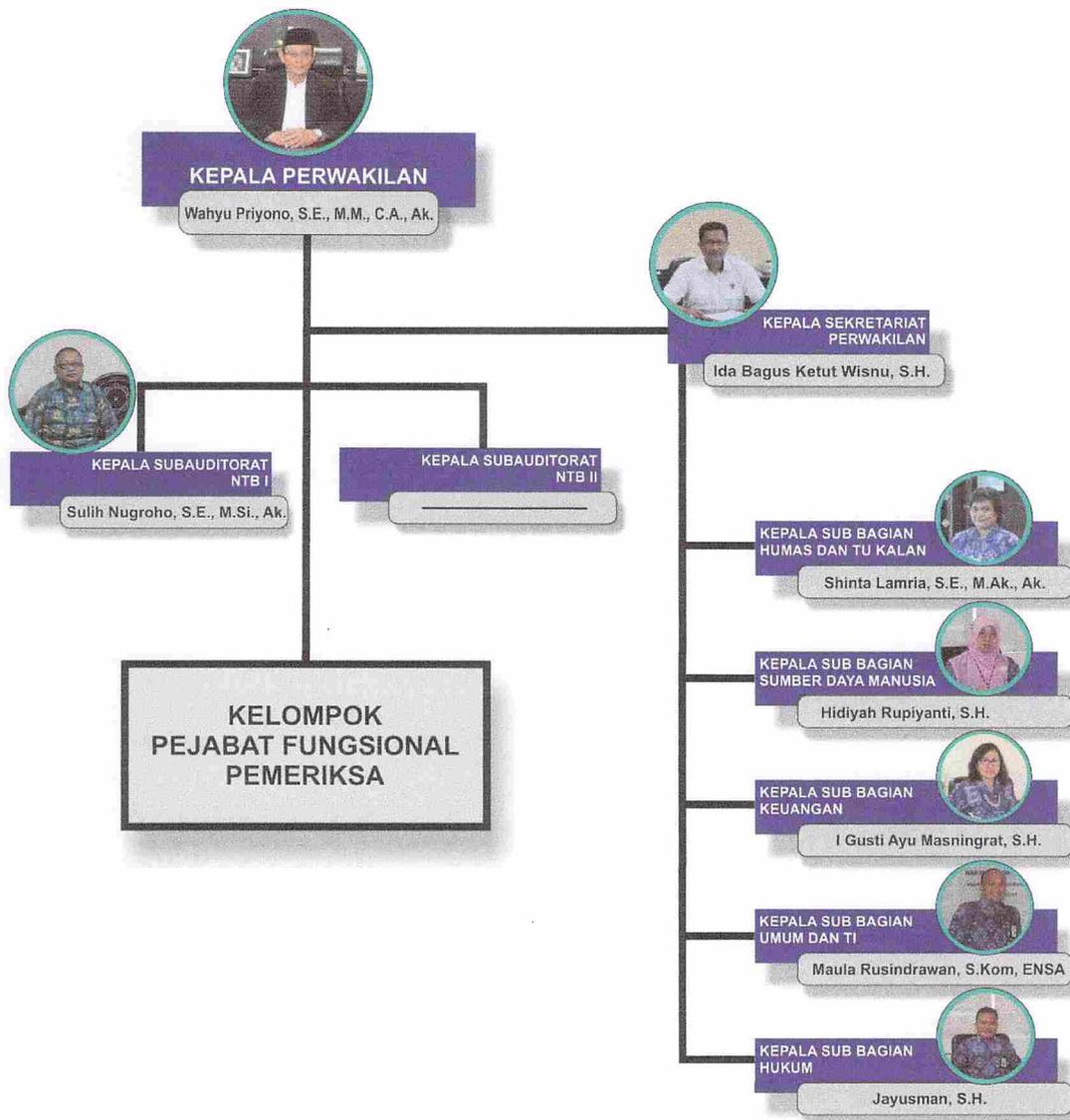
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, BPK Perwakilan Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTB berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;

9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB

BPK Perwakilan Provinsi NTB dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang membawahi satu orang Kepala Sekretariat Perwakilan, satu orang Kepala Subauditorat, lima orang Kepala Subbagian dan 40 orang Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa. Adapun Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-VIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Auditama Keuangan Negara VI yang terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi NTB

- b. Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi NTB dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- f. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

2. Subauditorat NTB I

Subauditorat NTB I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

3. Subauditorat NTB II

Subauditorat NTB II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram, Kabupaten Dompu, Kota Bima, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk :

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

4. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sumber Daya Manusia (SDM) BPK Perwakilan Provinsi NTB per 31 Desember 2016 berjumlah 97 orang yang terdiri dari satu orang Kepala Perwakilan, satu orang Kepala Sekretariat Perwakilan, satu orang Kepala Subauditorat, lima

orang Kepala Subbagian, 40 kelompok pejabat fungsional pemeriksa, 30 orang staf penunjang dan 19 orang tenaga kontrak.

Total Pagu Anggaran kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp19.753.685.000,00 terdiri dari Pagu DIPA BPK Pusat sebesar Rp8.553.347.000,00 dan Pagu DIPA Sekretariat Jenderal sebesar Rp11.200.338.000,00, dengan realisasi sebesar Rp18.199.077.353,00 atau 92,13% yang terdiri dari DIPA BPK Pusat sebesar Rp7.577.734.199,00 dan DIPA Sekretariat Jenderal sebesar Rp10.621.343.154,00.

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN
PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK)
BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2011-2015 menetapkan visi, misi, nilai dasar dan tujuan strategis BPK yaitu:

1. Visi

Mendukung BPK untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan melalui tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi NTB, Kota/Kabupaten di Provinsi NTB, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN VI. Adapun misi BPK Perwakilan NTB adalah:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
- Berperan aktif dalam mendeteksi dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan Negara.

2. Misi

Misi BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah sebagai berikut.

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Provinsi NTB;
- b. Memberikan usulan bahan pendapat atas hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Provinsi NTB; dan
- c. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan daerah di wilayah Provinsi NTB.

3. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya BPK Perwakilan Provinsi NTB menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut.

a. Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari

gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

b. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

c. Profesionalisme

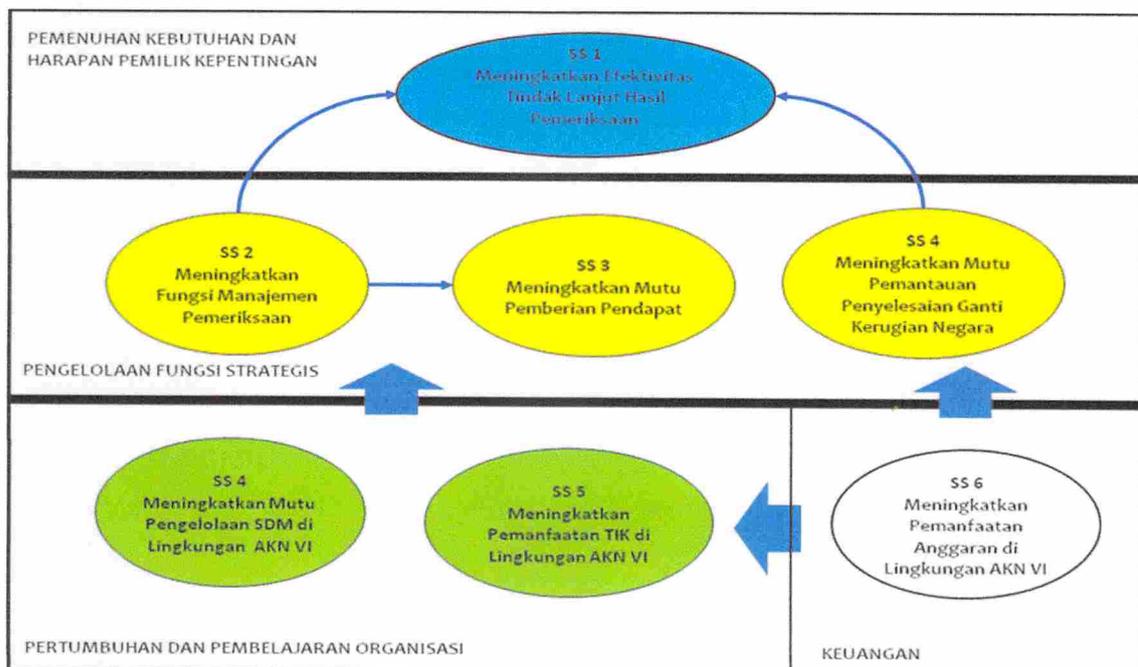
Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan Strategis

Melalui pelaksanaan misinya, BPK Perwakilan Provinsi NTB berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

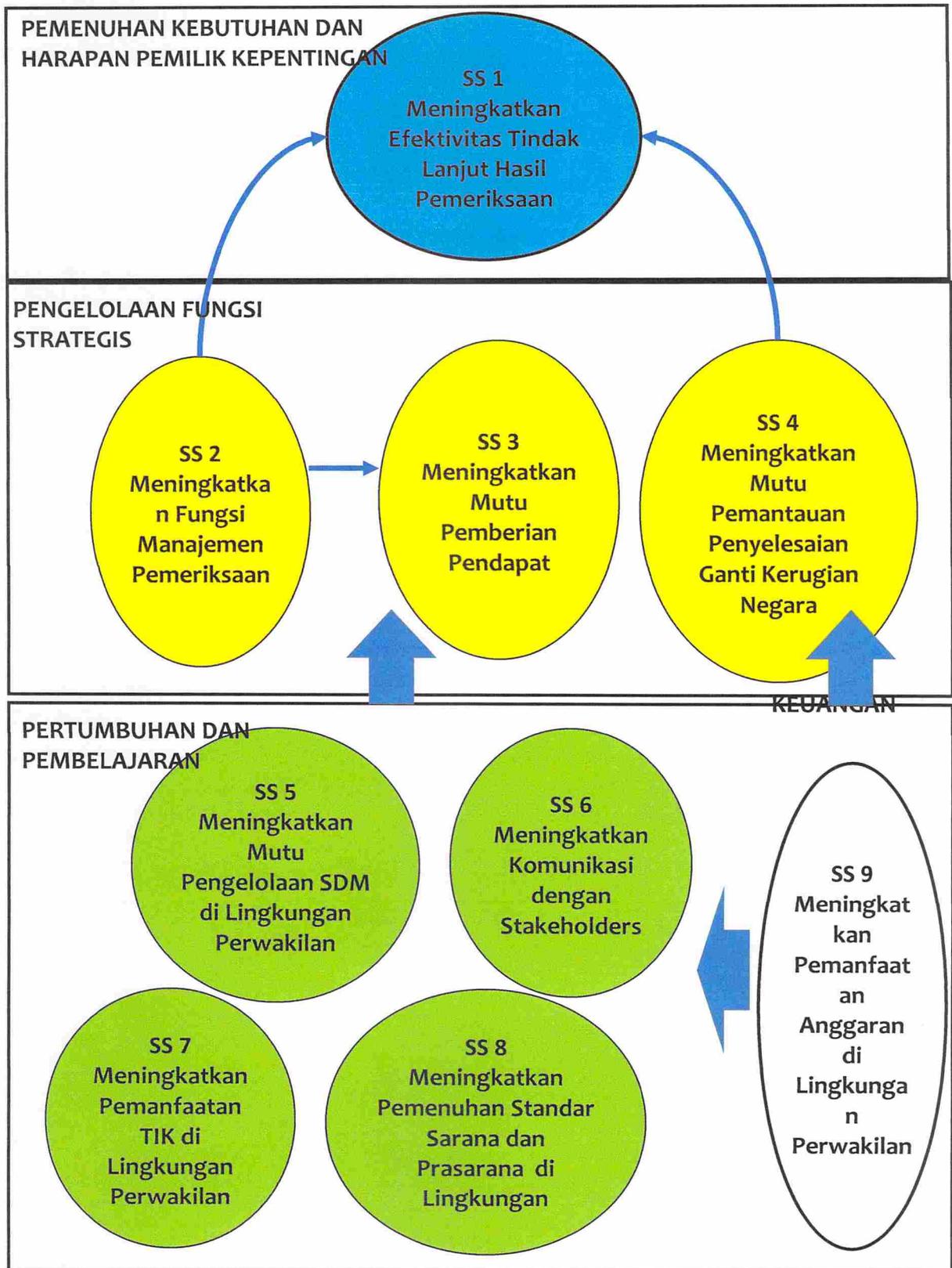
- a. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara/daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan melalui pemeriksaan keuangan daerah di wilayah Provinsi NTB;
- b. Mewujudkan pemeriksaan yang bernilai tinggi untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan; dan
- c. Mewujudkan efektivitas pengelolaan sumber daya dalam mendukung tata kelola organisasi di BPK Perwakilan Provinsi NTB

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, terdapat Peta Strategis BPK Eselon I (dhi. AKN VI) dan BPK RI Eselon II (dhi. Perwakilan). Adapun Peta Strategis BPK RI Eselon I (AKN VI) digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Peta Strategis BPK – Eselon I (AKN VI)

Sedangkan untuk perwakilan ditetapkan Peta Strategis BPK RI - Eselon II (Perwakilan) yang terdiri dari sembilan sasaran strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk sebagai berikut.



Gambar 3. Peta Strategis BPK Perwakilan

B. PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK RI menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tiap-tiap satuan kerja. Perwakilan BPK sebagai satuan kerja tersendiri mempunyai 26 IKU dan atas masing-masing IKU tersebut ditetapkan target-target pencapaian kinerjanya. IKU beserta target pencapaian kinerjanya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon I.

BPK Perwakilan Provinsi NTB telah menetapkan target pencapaian kinerja pada masing-masing IKU dan dituangkan ke dalam PKPK BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi NTB selaku Pejabat Eselon II dan Tortama VI selaku Pejabat Eselon I pada tanggal 29 Januari 2016.

Berikut diuraikan Sasaran Strategis (SS), IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2016 yang tertuang dalam PKPK.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2016
1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%
	1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6
	1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
	1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%
	1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	2.1	Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%
	2.2.	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	13%
	2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%
	3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%
	3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2016
4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22
	4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A
	5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%
	5.3	Persentase Penyusunan Best-Practice	0%
	5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice	0%
	5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%
	5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%
	5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2
	5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%
6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis.Manajerial (Non Pemeriksa)	90%
7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	80%

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2016

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN PROVINSI NTB
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB)

A. Pencapaian Skor BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2016

Pada tanggal 25 Januari 2017 bertempat di ruang rapat PSMK 2 Kantor Pusat BPK RI di Jakarta, dilaksanakan kegiatan minggu validasi SIMAK Semester II Tahun 2016 untuk melakukan penginputan atas nilai (skor) pencapaian kinerja seluruh satuan kerja eselon II. Dari kegiatan tersebut pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2016 sebagai berikut ini.

IKU	Uraian	Skor 2016	Target 2016	Capaian				
				2016	2015	2014	2013	2012
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB		97,06		97,06	94,43	92,90	94,65	87,14
SS.1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan								
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	105	60%	87,49%	85,12%	75,50%	56,49%	54,52%
1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	105	3,6	4,37	N/A	N/A	N/A	N/A
1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	0	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	0	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	101	100%	101%	N/A	N/A	N/A	N/A
1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	100	1	1	2	2	1	0
SS.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan								
2.1	Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	100	85%	85%	N/A	N/A	N/A	N/A
2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	105	13%	22,73%	4	4	3	3
2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan								
3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	100%	100%	97%
3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	73,33	100%	73,33%	N/A	N/A	N/A	N/A
SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara								
4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	50	22	11	22	22	22	22

IKU	Uraian	Skor 2016	Target 2016	Capaian				
				2016	2015	2014	2013	2012
4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	0	100%	0%	100%	100%	100%	100%
SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan								
5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100	A	A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	92,31	100%	92,31%	N/A	N/A	N/A	N/A
5.3	Persentase Penyusunan Best-Practice	100	0%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice	100	0%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	91,67	100%	91,67%	N/A	N/A	N/A	N/A
5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	105	2	3,80	2,80	2,3	2	2
5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	101,77	90%	91,59%	91,21%	87,19%	85,70%	75,31%
SS.6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan								
6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	87,50	100%	87,50%	96,88%	89,29%	86,67%	85,71%
6.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	104,94	90%	94,44%	82,72	86,63 jam	72,43 jam	83 jam
SS.7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan								
7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	105	80%	88,25%	94,28%	95,32%	91,58%	93,27%

Tabel 2. Skor pencapaian kinerja tahun 2012 s.d. 2016

Secara umum terjadi peningkatan dalam capaian target IKU selama 4 tahun terakhir. Di tahun 2016 skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB mencapai 97,06% dimana lebih besar dari 4 tahun sebelumnya, yang mana tahun 2015 skor kinerja sebesar 94,43%, tahun 2014 sebesar 92,90%, tahun 2013 sebesar 94,65% dan tahun 2012 sebesar 87,14%. BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berupaya meningkatkan skor capaian IKU ditahun-tahun berikutnya.

IKU	Uraian	Perbandingan Realisasi 2016 dengan Target 2016	Target 2016	Capaian				
				2016	2015	2014	2013	2012
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB				97,06	94,43	92,90	94,65	87,14
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan								
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	145,82%	60%	87,49%	85,12%	75,50%	56,49%	54,52%
1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	1,21	3,6	4,37	N/A	N/A	N/A	N/A

IKU	Uraian	Perbandingan Realisasi 2016 dengan Target 2016	Target 2016	Capaian				
				2016	2015	2014	2013	2012
1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	0%	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	0%	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	101%	100%	101%	N/A	N/A	N/A	N/A
1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2	1	0
SS.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan								
2.1	Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	100%	85%	85%	N/A	N/A	N/A	N/A
2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	174,85%	13%	22,73%	4	4	3	3
2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan								
3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%
3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	73,33%	100%	73,33%	N/A	N/A	N/A	N/A
SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara								
4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	0,5	22	11	22	22	22	22
4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan								
5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	A	A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	92,31%	100%	92,31%	N/A	N/A	N/A	N/A
5.3	Persentase Penyusunan Best-Practice	0%	0%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice	0%	0%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	91,67%	100%	91,67%	N/A	N/A	N/A	N/A
5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	1,9	2	3,80	2,80	2,3	2	2
5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	101,77%	90%	91,59%	91,21%	87,19%	85,70%	75,31%

IKU	Uraian	Perbandingan Realisasi 2016 dengan Target 2016	Target 2016	Capaian				
				2016	2015	2014	2013	2012
SS.6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan								
6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	87,50%	100%	87,50%	96,88%	89,29%	86,67%	85,71%
6.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	104,93%	90%	94,44%	82,72	86,63 jam	72,43 jam	83 jam
SS.7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan								
7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	110,31%	80%	88,25%	94,28%	95,32%	91,58%	93,27%

Tabel 3. Pencapaian IKU dalam Target Tahun 2016

Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB di tahun 2016 secara umum telah sesuai dengan target lima tahunan. Banyak terdapat perubahan variabel dalam sasaran strategis kinerja sehingga banyak variabel yang tidak terdapat dalam sasaran strategis kinerja tahun sebelumnya. Periode 2012-2015 memuat sembilan sasaran strategis dan periode 2016 memuat tujuh sasaran strategis .

B. SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini bertujuan agar BPK mampu memberikan rekomendasi bermutu yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. SS ini juga berupaya untuk meningkatkan efektivitas kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak hasil pemeriksaan BPK.

Sasaran strategis 1 diukur melalui enam IKU yaitu:

- IKU 1.1 –Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
- IKU 1.2 - Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK;
- IKU 1.3 - Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH;
- IKU 1.4 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara;
- IKU 1.5 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli;
- IKU 1.6 – Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

1. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan kepada entitas yang diperiksa periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 4.253 dengan rincian sebagai berikut:

No	Status Tindak Lanjut	Jumlah	Persentase
1	Selesai ditindaklanjuti	3.700	87,00%
2	Masih dalam proses/Belum selesai ditindaklanjuti	472	11,10%
3	Belum ditindaklanjuti	60	1,41%
4	Tidak dapat ditindaklanjuti	21	0,49%
Jumlah rekomendasi yang disampaikan		4,253	100%

Tabel 4 - Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Auditee pada BPK Perwakilan Provinsi NTB mencapai 87,49% dari target yang ditetapkan sebesar 60%. Dengan demikian untuk IKU 1.1, Perwakilan Provinsi NTB dapat mencapai target walau pun terdapat beberapa hambatan yang pada umumnya masih ada entitas yang kurang aktif dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pencapaian tahun 2016 meningkat sebesar 2,37% dari tahun sebelumnya.

IKU	Skor Tahun 2016	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun		
			2016	2015	2014
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	105	60%	87,49%	85,12%	75,50%

Tabel 5 - Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2016, 2015 dan 2014

Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa realisasi IKU 1.1 Tahun 2016 mencapai 87,49% melebihi target yang ditetapkan pada Tahun 2016 yaitu 60%.

Tercapainya IKU 1.1 tidak terlepas dari peran BPK Perwakilan Provinsi NTB yang secara rutin tiap semester menyelenggarakan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Semester I tahun 2016 dilaksanakan kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester I Tahun 2016 pada tanggal 25 s.d. 27 Juli 2016. Sedangkan untuk semester II tahun 2016 kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 9 Desember 2016.



Gambar 4 Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I 2016



Gambar 5 Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II 2016

2. IKU 1.2 - Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

IKU Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK adalah IKU 2016 yang baru. IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. IKU ini diukur berdasarkan persepsi auditee melalui survei tingkat kepuasan.

Dimensi yang diukur mencakup Integritas, Independensi dan Profesionalisme.

Realisasi indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK tahun 2016 sebesar 4.37. Realisasi tersebut telah melebihi target tahun 2016 sebesar 3,6.

3. IKU 1.3 - Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

IKU 2016 yang baru mengenai Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH apabila dibandingkan dengan IKU sebelumnya perihal Realisasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau kerugian negara, konteksnya hampir sama, realisasi sampai dengan Semester II Tahun 2016 sebesar 0%. Realisasi tersebut belum tercapai dikarenakan sampai dengan berakhirnya Semester II Tahun 2016 belum ada hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH, sehingga IKU ini belum tercapai.

4. IKU 1.4 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara

IKU ini juga termasuk IKU baru di 2016 dimana IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan yang meliputi perhitungan kerugian negara/daerah (yang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK). Realisasi tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara di tahun 2016 sebesar 0%. Realisasi tersebut belum memenuhi dengan target 2016 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan belum ada hasil pemeriksaan yang berindikasi unsur pidana dan/atau permintaan penghitungan kerugian negara.

5. IKU 1.5 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli

IKU ini termasuk IKU baru di 2016. IKU ini mengukur sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan terkait Pemberian Keterangan Ahli. Realisasi tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli tahun 2016 sebesar 101%. Realisasi tersebut telah memenuhi target 2016 sebesar 100%. Pemberian keterangan ahli dilaksanakan oleh Sulih Nugroho, SE., Msi., Ak., CA pada tanggal 22 September 2016.

6. IKU 1.6 – Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

IKU ini menunjukkan tingkat produktivitas AKN terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan bahan pertimbangan dan bahan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Perwakilan NTB telah mengirimkan satu usulan bahan pendapat kepada Ditama Revbang melalui Nota Dinas Nomor 517/ND/XIX.MTR/11/2016 tanggal 22 November 2016 yaitu Peningkatan Kinerja BUMD melalui Pembinaan Pemerintah Daerah. Realisasi tersebut telah memenuhi target 2016 sebesar 1. Sesuai dengan jawaban Nota Dinas dari Direktorat EPP Nomor

752/ND/XII.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 bahwa usulan bahan pendapat tersebut diterima sebagai capaian IKU sehingga bahan pendapat yang diterima sebagai capaian IKU sebesar satu bahan pendapat.

Perbandingan capaian Tahun 2016 dengan capaian Tahun 2015 dan 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian Tahun		
			2016	2015	2014
1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2

Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU 1.6 Tahun 2016, 2015 dan 2014

C. SS.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan NTB. Melalui SS ini, BPK Perwakilan NTB melakukan pengendalian mutu pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kode etik pemeriksa, dan kebutuhan pemangku kepentingan. SS ini juga mencakup upaya peningkatan lingkup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Melalui pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, BPK berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan agar lebih efisien dan efektif melalui pengelolaan biaya pemeriksaan yang optimal dan pemanfaatan teknologi informasi. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. SS 2 diukur melalui tiga IKU sebagai berikut.

- IKU 2.1 – Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan
- IKU 2.2 – Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP
- IKU 2.3 – Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

1. **IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan**

Pada tahun 2016 ini, BPK Perwakilan Provinsi NTB telah melakukan dua kali revisi RKP. Revisi pertama diajukan pada tanggal 29 Agustus 2016 sesuai dengan nota dinas Kepala Perwakilan nomor 354/ND/XIX.MTR/08/2016 dan pengajuan revisi RKP kedua pada tanggal 3 November 2016 sesuai dengan nota dinas Kepala Perwakilan nomor 477/ND/XIX.MTR/11/2016.

Jumlah LHP yang diterbitkan pada Tahun 2016 yakni sebanyak 33 LHP dan sesuai dengan target yang ditetapkan. LHP tersebut terdiri dari 11 LHP LKPD, 5 LHP Kinerja dan 17 LHP DTT.

Realisasi tingkat konsistensi antara rencana pemeriksaan dan pelaksanaan tahun 2016 sebesar 85%, yang mana telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2016 yaitu 85%.

2. IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP

Skor IKU 2.2 pada Tahun 2016 adalah sebesar 105 karena mampu merealisasikan 5 LHP Kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 5 LHP Kinerja. Di tahun 2016 realisasi rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP sebesar 22.73% melebihi dengan target yang ditetapkan yaitu 13%.

3. IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-undang No.15 Tahun 2004, sementara untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada perencanaan penyelesaian pemeriksaan yang dinyatakan dalam P2.

Realisasi ketepatan waktu penyampaian LHP tahun 2016 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

D. SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

1. IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP).

Tahun 2016 pemenuhan *Quality Control* (QC) pemeriksaan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

2. IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Assurance (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

Pencapaian BPK Perwakilan Provinsi NTB telah memenuhi target sebesar 100% dari target 100%.

Perbandingan capaian Tahun 2016 dengan capaian Tahun 2015 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

IKU	Skor Tahun 2016	Target Tahun 2016	Capaian Tahun		
			2016	2015	2014
3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	100%

Tabel 7 - Perbandingan Capaian IKU 3.2 Tahun 2016, 2015 dan 2014

Selama tiga tahun berturut-turut target Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan telah terpenuhi.

3. IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP

IKU ini menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh satker pemeriksaan. Sesuai dengan arahan Badan, LHP tidak boleh mengandung kesalahan (Zero defect) maka LHP harus 100% akurat. Tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP 2016 sebesar 73,33%. Realisasi tersebut belum memenuhi dengan target tahun 2016 sebesar 100%.

E. SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

1. IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK No.2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Realisasi tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2016 adalah sebesar 100% yang mana telah memenuhi target 2016 sebesar 100%.

Semester I tahun 2016 dilaksanakan kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester I Tahun 2016 pada tanggal 25 s.d. 27 Juli 2016. Sedangkan untuk semester II tahun 2016 kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 9 Desember 2016.

2. IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh Auditorat/Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Revbang.

Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS non bendaharawan dan pihak ketiga.

Realisasi IKU 4.2 jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara 2016 tidak mencapai target yaitu sebanyak 11 laporan dari target 2016 sebesar 22. Hal ini disebabkan jadwal pemeriksaan pemantauan penyelesaian kerugian negara terlambat dilaksanakan, karena perbedaan pemahaman akan periode pemeriksaannya.

3. IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara oleh Auditorat/Perwakilan ke Dit. EPP adalah dalam rangka penyusunan bahan IHPS. Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara fisik dan melalui input ke SIKAD

Realisasi ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara ke Ditama Revbang tahun 2016 sebesar 0% dimana tidak sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini disebabkan jadwal pemeriksaan pemantauan penyelesaian kerugian negara terlambat dilaksanakan, karena perbedaan pemahaman akan periode pemeriksaannya.

F. SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

1. IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. Realisasi hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja perwakilan tahun 2016 dinilai A dimana telah sesuai dengan target tahunan.

2. IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IKU tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Realisasi tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi di tahun 2016 sebesar 92,31%. Realisasi tersebut belum memenuhi dengan target tahun 2016 sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya penggunaan layanan edrive, SISDM dan portal e-audit.

3. IKU 5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice

IKU ini mengukur tingkat penyebaran *best practices* pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan. Pada tahun 2016 persentase penyusunan *best-practice* tidak ditargetkan.

4. IKU 5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice

IKU ini bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan LAK secara tepat waktu. Pada tahun 2016 persentase penyebaran *best-practice* tidak ditargetkan.

5. IKU 5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

IKU ini bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan LAK secara tepat waktu.

Realisasi ketepatan waktu penyampaian laporan akuntabilitas kinerja perwakilan tahun 2016 adalah sesuai target tahunan yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

6. IKU 5.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan

IKU ini bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan laporan bulanan secara tepat waktu.

Realisasi ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan tahun 2016 adalah 91,67% belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena laporan bulan Maret terlambat disampaikan.

7. IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

IKU ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarkan hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa.

Pada tahun 2016 realisasi jumlah media relation yang dilaksanakan adalah sebesar 3,8 dimana melebihi target tahunan yang ditetapkan yaitu sebesar 2.

Media Relation yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Media Visit ke media cetak Radar Sumbawa pada tanggal 24 April 2016. Tujuan dilaksanakannya media visit ini adalah untuk meningkatkan kerjasama BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan pihak media.



Gambar 6 Media Visit ke Radar Sumbawa 24 April 2016

- b. Media Workshop dengan tema "Penyerahan LHP atas LKPD TA 2015 kepada delapan entitas di Provinsi NTB" yang diselenggarakan pada tanggal 1 juni 2016. Acara Media Workshop ini mengundang rekan-rekan dari media cetak seperti Lombok Post, Suara NTB, NTB Post, Radar Lombok, Radar Mandalika, Gaung NTB, Koran Berita, dan media elektronik seperti TVRI, TV9, Lombok TV, Lombok Post TV.



Gambar 6 Media Workshop tanggal 1 Juni 2016

- c. Siaran Pers "BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu" dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016.



Gambar 7 Siaran Pers tanggal 16 Desember 2016

- d. Media Workshop dengan tema "Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB atas Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu" yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2016. Acara Media Workshop ini mengundang rekan-rekan dari media cetak seperti Lombok Post, Suara NTB, NTB Post, Radar Lombok, Radar Mandalika, Radar Sumbawa dan media elektronik seperti TVRI, TV9, Lombok TV, RRI, Trans7.



Gambar 8 Media Workshop tanggal 19 Desember 2016

- e. Media Visit ke media cetak Kabar Sumbawa, Radar Sumbawa, Radar Tambora, dan Kabar Harian Bima yang dilaksanakan pada tanggal 27-30 Desember 2016.



Gambar 9 Media Visit ke Kabar Sumbawa



Gambar 10 Media Visit ke Radar Sumbawa



Gambar 11 Media Visit ke Radar Tambora



Gambar 12 Media Visit ke Kabar Harian Bima

8. IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

IKU ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai.

Realisasi tingkat pemenuhan sarana dan prasarana tahun 2016 sebesar 91,59% dimana telah melebihi target yang ditetapkan di tahun 2016 yaitu sebesar 90%.



Gambar 13 Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB

G. SS.6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

1. IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan.

Realisasi persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa tahun 2016 adalah 87,50% atau sebanyak 35 pemeriksa dari 40 pemeriksa di Perwakilan Provinsi NTB. Capaian ini belum memenuhi target tahunan yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

2. IKU 6.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa)

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja pengembangan kompetensi pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan.

Realisasi persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa) tahun 2016 adalah 94,44% atau sebanyak 34 non pemeriksa dari 36 non pemeriksa di Perwakilan Provinsi NTB. Capaian ini telah melebihi target tahunan 2016 yang ditetapkan yaitu sebesar 90%.

H. SS.7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Sasaran strategis ini merupakan upaya BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam mendukung pengelolaan keuangan BPK yang efisien, efektif dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Realisasi tingkat kinerja implementasi anggaran di lingkungan Perwakilan tahun 2016 adalah 88,25%. Capaian ini telah memenuhi target tahunan 2016 yang ditetapkan yaitu sebesar 80%.

BAB IV PENUTUP

A. Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan NTB Secara Umum

LAK BPK Perwakilan NTB ini merupakan sumbangan penyusunan LAK Auditama Keuangan VI BPK RI sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi NTB mengalami kenaikan dalam pencapaian skor kinerja, yaitu dari 94,43 pada tahun 2015 menjadi 97,06 pada tahun 2016. Perolehan skor kinerja tersebut merupakan formulasi dari skor tujuh Sasaran Strategis sebagai berikut.

Sasaran Strategis		Skor
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	102,48
2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	102,50
3	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	93,60
4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	57,00
5	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	97,90
6	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	93,95
7	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	105,00
SKOR KINERJA		97,06

Tabel 8 Skor Sasaran Strategis BPK Perwakilan NTB Tahun 2016

B. Penyebab Secara Umum Terjadinya Kenaikan Skor

BPK Perwakilan Provinsi NTB mengalami kenaikan dalam pencapaian skor kinerja pada tahun 2016 dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Pencapaian IKU tahun 2016 tidak dapat banyak dibandingkan dikarenakan variabel sasaran strategis IKU tahun 2016 berbeda dengan tahun 2012 s.d. 2015.

C. Kendala Utama Penyebab Terjadinya Penurunan Skor

Pencapaian IKU tahun 2016 tidak dapat banyak dibandingkan dikarenakan variabel sasaran strategis IKU tahun 2016 berbeda dengan tahun 2012 s.d. 2015.

D. Strategi Pemecahan Masalah Serta Rencana Aksi yang Akan Diambil Terkait Pemenuhan Target Periode Berikutnya

BPK Perwakilan Provinsi NTB akan mengevaluasi kinerja Tahun 2016 dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk dapat meningkatkan skorkinerja di

tahun yang akan datang. Serta mempertahankan kinerja yang telah sesuai atau melebihi target pada kinerja periode berikutnya. Atas kendala-kendala yang ada, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan melakukan evaluasi ke dalam dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar target-target yang ada dapat segera tercapai.

Penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi NTB ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.



**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT UNIT ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Unit Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi NTB
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Skor Tahun 2016
(1)	(2)		(3)		
1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	87,49%	105,00
	1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	4,37	105,00
	1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	0%	0,00
	1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	0%	0,00
	1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	101%	101,00
	1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100,00
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	2.1	Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	100,00
	2.2.	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	13%	22,73%	105,00
	2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100,00
3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100,00
	3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100,00
	3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	73,33%	73,33
4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100,00
	4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22	11	50,00
	4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	0%	0,00
5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	5.1	Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	A	100,00
	5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	92,31%	92,31
	5.3	Persentase Penyusunan Best-Practice	0%	0%	100,00
	5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice	0%	0%	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Skor Tahun 2016
(1)	(2)		(3)		
	5.5	Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%	100%	100,00
	5.6	Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	91,67%	91,67
	5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	3,8	105,00
	5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	91,59%	101,77
6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	87,50%	87,50
	6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis.Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	94,44%	104,94
7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	80%	88,25%	105,00

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp19.753.685.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp18.199.077.353,00



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Udayana No. 22 Mataram, NTB
Telp. 0370-6163333, Fax. 0370-6162999
www.mataram.bpk.go.id